

Kejari Bakal Periksa Bupati dan Wakil Bupati



Terkait Dugaan Fee Pokir DPRD

KARAWANG, RAKA- Dugaan adanya fee pokir DPRD Karawang terus ditelusuri. Bahkan, rencananya Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang akan memeriksa seluruh penerima pokir, termasuk memeriksa bupati dan wakil bupati.

Ketua Peradi Karawang, Asep Agustian mengapresiasi kepala Kejari Karawang Martha Parulina Berliana, yang ber-

ni memeriksa dugaan adanya fee 5 persen dari pokir yang diterima oleh pejabat legislatif dan eksekutif. "Periksa juga bupati dan wakil bupati jangan hanya anggota DPRD. Apalagi justru pihak eksekutif paling banyak mendapat pokir. Perbandingannya 30 persen anggota DPRD dan 70 persen itu eksekutif," katanya, Minggu (29/5).

Diteruskannya, pihaknya mendukung pemeriksaan terhadap semua penerima pokir karena untuk memberikan kepastian hukum. Isu adanya transaksional dalam proyek pokir sudah lama didengarnya. "Isu inikan sudah lama kita dengar. Makanya dengan diperiksa oleh kejaksaan, masyarakat mendapat kepastian hukum," katanya.

Namun Asep mengingatkan, agar kejaksaan tidak memaksakan dalam pemeriksaan

nanti. Artinya jika memang tidak bisa menemukan bukti harus segera dihentikan. "Kalau ada buktinya harus lanjut terus siapa pun mereka jangan takut karena masyarakat mendukung kejaksaan. Namun kalau tidak ada bukti sebaiknya segera dihentikan," terangnya.

Asep juga mendukung kejaksaan memeriksa bupati dan wakil bupati yang juga mendapat pokir. Apalagi dikabarkan bupati dan wakil

bupati menerima paling besar hingga mencapai puluhan miliar rupiah. "Periksa jangan tebang pilih. Siapa pun yang bersalah harus diproses," terangnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Karawang Martha Parulina Berliana menuturkan, setelah pihaknya melakukan telaah laporan masyarakat terkait dugaan adanya fee 5 persen dari anggaran pokir pihaknya memiliki kesimpulan untuk meningkatkan kasus ini men-

jadi penyelidikan. Untuk itu, dipandang perlu untuk memanggil dan memeriksa semua penerima dana pokir. "Jadi penerima pokir itu bukan hanya pihak legislatif tapi juga eksekutif dan semuanya akan kita panggil," paparnya.

Ditambahkannya, siapa pun penerima pokir akan diperiksa. Jika bupati dan wakil bupati menerima pokir tetap harus diperiksa. Namun dia belum bisa memastikan kapan akan memeriksa bupati dan

wakil bupati. "Semua mengikuti proses dan tahapan tidak bisa memeriksa seluruhnya secara bersamaan. Kapan pastinya saya belum tahu, tapi pasti akan kita jadwalkan," tutupnya. (asy)